





MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD KOTA YOGYAKARTA

TUNTASKAN RAPERDA RPJPD DAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BANK JOGJA

Kawal Arah Kebijakan Hingga Keberpihakan Ekonomi Lokal



KR-Ardhi Wahdan

Susanto Dwi Antoro menyampaikan rekomendasi Pansus RPJPD.

YOGYA(KR) - Memasuki masa akhir jabatan anggota DPRD Kota Yogya periode 2019-2024, dua rancangan peraturan daerah (raperd) berhasil dituntaskan sekaligus. Keduanya ialah raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta raperda terkait perubahan kelembagaan Perumda Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda). Kini tugas selanjutnya ialah mengawal arah kebijakan Kota Yogya hingga keberpihakan terhadap ekonomi lokal sesuai rekomendasi yang telah disampaikan ke eksekutif.

Penuntasan kedua raperda tersebut seiring dengan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif melalui sidang paripurna yang digelar Kamis (4/7) lalu. Naskah hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh panitia khusus (pansus) lantas diteruskan ke Gubernur untuk kepentingan evaluasi serta nomor register sebelum dijadikan lembaran hukum daerah berupa perda.

Juru Bicara Pansus Raperda RPJPD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, mengungkapkan selama pembahasan pihaknya berhasil merumuskan sejumlah catatan. Selidaknya terdapat enam aspek yang menjadi perhatian. Di antaranya berkaitan dengan arah kebijakan dan isu-isu strategis. Meski sudah dilakukan identifikasi secara makro oleh tim eksekutif untuk jangka waktu 20 tahun namun masih perlu mendapatkan solusi dan prioritas penyelesaian pada masa mendatang. "Seperti misalnya isu strategis di bidang pendidikan kaitannya dengan anak putus sekolah. Jangan hanya dilihat dari aspek ekonominya saja tetapi sosialnya juga. Kemudian kenakalan remaja yang menjurus pada tindakan kriminal, tentunya instansi pendidikan tidak bisa lepas tangan," urainya.

Begitu pula isu strategis dan arah kebijakan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan stunting, angka pernikahan dini, kebutuhan hunian, penanganan sampah, transportasi, lalu lintas, parkir sampai jaminan kesehatan. Pada masa mendatang hingga 20 tahun ke depan sesuai arah RPJPD, berbagai persoalan tersebut dibutuhkan kebijakan yang mampu menjadi solusi penanganan.

Ditambah lagi dengan era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya hal itu telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat dan memiliki dampak dari sisi positif maupun negatif. Adanya fenomena seperti judi online, prostitusi online, game online hingga pinjaman online merupakan isu sosial ekonomi dan budaya yang tidak bisa dikesampingkan. "Perubahan sosial ekonomi dan budaya 20 tahun ke depan akan semakin cepat dan dinamis sehingga perlu diantisipasi dengan baik," ungkap Susanto Dwi Antoro.

Oleh karena itu pihaknya selaku tim pembahas Raperda RPJPD Kota Yogya 2025-2045 memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh tim eksekutif. Rekomendasi itu antara lain penyusunan program pembangunan harus mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah dituangkan dalam RPJPD. Selain itu perlu ada kajian dan kebijakan yang memungkinkan kelas khusus guna mengatasi permasalahan kanak-kanak remaja. Literasi digital juga perlu menjadi perhatian khusus agar perkembangan teknologi informasi dapat dimaksimalkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Sementara terkait dengan raperda perubahan kelembagaan Bank Jogja, meski itu merupakan amanat dari regulasi yang lebih tinggi namun akan berdampak signifikan terhadap operasional bank milik Pemkot. Pasalnya ketika masih menjadi perumda maka orientasinya lebih pada aspek pelayanan umum. Sedangkan ketika sudah menjadi perseroda maka sektor bisnis justru menjadi urusan utama. Akan tetapi penguatan terhadap ekonomi lokal tidak bisa dikesampingkan.

Seperti dijabarkan Juru Bicara Pansus Raperda Perseroda Bank Jogja, Oleg Yohan, perubahan bentuk badan hukum tersebut seharusnya dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar terhadap perekonomian daerah di Kota



KR-Ardhi Wahdan

Oleg Yohan menyampaikan rekomendasi Pansus Bank Jogja.

Yogya. Salah satunya dapat diwujudkan dengan memperluas akses keuangan kepada masyarakat dan mendorong pembiayaan usaha mikro kecil menengah secara lebih efisien dan efektif. "Keberpihakan terhadap ekonomi lokal itu bisa dialokasikan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM dan koperasi di Kota Yogya tentunya dengan mempertimbangkan kinerja Bank Jogja dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah," katanya.

Tim pansus, imbuh Oleg, juga merekomendasikan agar Bank Jogja segera menyusun perencanaan, mengelola, dan menghitungkan besaran subsidi bunga pinjaman secara profesional. Hal ini agar subsidi tersebut dapat diakses oleh UMKM dan koperasi yang tepat sasaran dan akuntabel. Pihaknya di lembaga dewan juga akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan guna memastikan rekomendasi tim pansus benar-benar dijalankan. (Dhi) f



KR-Ardhi Wahdan

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Dhian Novitasari menandatangani persetujuan bersama.



KR-Ardhi Wahdan

Pj Walikota Yogya Sugeng Purwanto menandatangani persetujuan bersama.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005